

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015 disebutkan bahwa pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing merupakan landasan utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya, sehingga diharapkan akan dapat diwujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, peningkatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/rumah tangga.

Kemajuan dan kemampuan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan (share) masing-masing sektor ekonomi yang membentuk kerangka ekonomi daerah sebagaimana tercermin dalam PDRB daerah setiap tahunnya, kekuatan masing-masing sektor sangat tergantung kepada kebijakan pembangunan, kondisi daerah serta kemampuan pendanaan yang akan tergambarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya.

Dari hasil analisa Input-Output, sumbangan (share) masing-masing sektor dalam PDRB terlihat bahwa sektor perdagangan dan jasa memberikan sumbangan yang cukup besar yakni sebesar 40% dari total nilai tambah bruto, hal ini memperkuat fakta bahwa saat ini Kota Solok makin bergerak mengarah kepada Kota Perdagangan dan Jasa sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015.

Dari hasil analisa serta fakta pendukung di lapangan, maka untuk tahun 2014 rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Solok akan tetap disinergikan/mengacu pada rencana kerja pembangunan baik secara Nasional, Provinsi maupun RPJM Daerah, yaitu masih akan diarahkan untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan perdagangan yang efisien dan berdaya saing global melalui program-program yang mendukung pergerakan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi angka kemiskinan tanpa mengabaikan pembangunan sektor-sektor non ekonomi lainnya.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Kondisi makro ekonomi suatu daerah bisa dibaca dari Perkembangan PDRB daerah tersebut, dimana data yang disajikan dalam PDRB akan menunjukkan jumlah nilai output sebagai hasil dari kegiatan ekonomi suatu daerah, yang dibentuk dan dihitung dari 9 (sembilan) sektor berkontribusi secara bersama-sama membentuk PDRB. Dari data PDRB dapat diketahui Struktur Ekonomi Daerah, kecenderungan arah aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun bersangkutan.

Dari data PDRB Kota Solok tahun 2011 yang telah selesai diukur dan disusun, terlihat kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, tahun 2011 PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.1.226.257.230.000,-. Berdasarkan pada PDRB tahun 2011 maka proyeksi PDRB tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.336.620.380.000,-. Proyeksi peningkatan PDRB tahun 2013 sebesar Rp.1.456.916.210.000,-. Proyeksi tersebut didasarkan pada persentase terendah peningkatan PDRB dari tahun 2007 s/d 2011 yang peningkatannya berkisar antara 9 s/d 15%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Solok pada tahun 2013 ditargetkan akan sama dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2013 sebesar 6,8%, terjadi peningkatan sebesar 0,6% dibanding tahun 2012 yang berada pada angka 6,28%. Hal ini didasarkan pada jarak antar kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang tidak terlalu jauh dari Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan lancarnya transportasi ke Ibukota Provinsi tersebut.

Peningkatan pada PDRB tersebut terjadi karena perkembangan sektor-sektor pembentuknya yang memberikan kontribusi baik yang meningkat maupun yang menurun sesuai perkembangannya, prediksi kontribusi/sumbangan per sektor pada tahun 2012 (untuk pengukuran kontribusi persektor tahun 2012 akan dilakukan pengukurannya pada tahun 2013) dan prediksi perkembangannya pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertanian, sektor ini pada tahun 2013 diperkirakan akan memberikan share yang menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Tahun 2012 share yang diberikan sebesar 8,67% dan menurun pada 2013 menjadi sebesar 8,61% hal ini karena adanya penurunan share dari sub sektor tanaman pangan dan peternakan sebagai akibat adanya peralihan fungsi lahan pertanian yang juga mengakibatkan berkurangnya hijauan yang akan menjadi sumber makanan bagi ternak.

Pertambangan dan Penggalan, sektor ini pada tahun 2013 diperkirakan akan memberikan share yang menurun dibandingkan tahun 2012. Tahun 2012 share yang diberikan sebesar 0,62% dan menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,61%, hal ini karena lahan tambang dan penggalan sangat terbatas selain itu juga pertimbangan terhadap dampak terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan.

Industri Pengolahan, sektor ini pada tahun 2013 diperkirakan sedikit memberikanshare yang meningkat dibanding pada tahun 2012 sebesar 8,74%. Tahun 2013 share yang diberikan sebesar 8,75%, peningkatan ini terjadi sebagai dampak adanya solusi dari ketersediaan bahan baku, baik dalam jumlah maupun harga yang digunakan untuk industri pengolahan.

Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor ini pada tahun 2013 diperkirakan memberikan share yang menurun dibanding tahun 2012 sebesar 2,78%. Tahun 2013 share yang diberikan sebesar 2,75%. Penurunan ini berkaitan dengan tingkat pelayanan yang

diberikan dihubungkan dengan jumlah penduduk dan kapasitas produksi dari masing-masing subsektor.

Bangunan, sektor ini pada tahun 2013 diperkirakan memberikan share yang meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 15,37%. Tahun 2013 share yang diberikan sebesar 15,47%. Peningkatan ini menunjukkan kegiatan disektor bangunan mengalami peningkatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui program kegiatan yang ada dalam APBD maupun pihak swasta yang saat ini mulai giat dalam berinvestasi dalam bentuk pendirian berbagai bangunan.

Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor ini tahun 2013 diperkirakan memberikan share yang meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 10,69%. Tahun 2013 share yang diberikan sebesar 10,76%, peningkatan ini terjadi karena sektor perdagangan bisa menghasilkan eksternalitas positif dan efek ganda yang menyebabkan bergerak naiknya aktivitas sektor ekonomi lainnya, seperti sektor keuangan, pengangkutan, komunikasi dan industri pengolahan, disamping itu juga merupakan sektor yang dominan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.

Pengangkutan dan Komunikasi, sektor ini tahun 2013 diperkirakan memberikan share yang meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 21,69%. Tahun 2013 share yang diberikan sebesar 21,70%. Peningkatan ini karena adanya dari sub sektor komunikasi yang saat ini memang mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan teknologi perkomunikasian.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor ini tahun 2013 diperkirakan memberikan share yang meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 7,62%. Tahun 2013 share yang diberikan sebesar 7,77%. Peningkatan ini disumbang melalui peningkatan sub sektor Bank dan Lembaga Keuangan yang memberikan andilnya sebagai penyandang modal/dana bagi bergerak majunya aktivitas ekonomi, serta sub sektor sewa bangunan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan aktivitas ekonomi tersebut.

Jasa-jasa, sektor ini tahun 2013 diperkirakan memberikan share yang menurun dibanding tahun 2012 sebesar 23,82%. Tahun 2013 share yang diberikan sebesar 23,75%. Penurunan ini karena adanya penurunan sub sektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan serta sub sektor swasta (Sosial Kemasyarakatan, Hiburan dan Rekreasi).

Tingkat Inflasi, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercapai sesuai dengan perhitungan yang diharapkan, akan tetapi angka yang diperoleh bukan merupakan angka riil sebenarnya hal ini karena adanya pengaruh dari inflasi, inflasi Kota Solok pada tahun 2012 tidak akan jauh berbeda dari tingkat inflasi di Kota Padang (yang diukur Bank Indonesia tiap tahunnya) yang selama ini menjadi acuan bagi perhitungan Inflasi tingkat Provinsi Sumatera Barat, ini diperkirakan akan mencapai angka 5,2% dengan range $\pm 1\%$. Sedangkan perkiran inflasi Tahun 2013 masih berkisar pada angka 5,2% sampai 6%, hal ini antara lain disebabkan oleh penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Tingkat Investasi, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,28% tahun 2012, maka akan diperlukan investasi sebesar Rp.579,80 Milyar, sedangkan untuk tahun 2013 dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% dibutuhkan investasi sebesar Rp.661,20Milyar, untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, dari jumlah investasi tersebut diharapkan sekitar 70% akan bersumber dari investasi swasta sedangkan 30% lagi diharapkan merupakan investasi dari pemerintah. Untuk mencapai hal ini pemerintah akan terus berupaya untuk menggairahkan investasi dengan pemberian kemudahan bagi investor antara lain dengan penyederhanaan prosedur dan melengkapi fasilitas yang berkaitan dengan penanaman modal.

Pendapatan Perkapita, pada tahun 2013 pendapatan per kapita Kota Solok diperkirakan naik menjadi sebesar Rp.24.252.800,-, pada tahun 2012 pendapatan per kapita sebesar Rp.22.250.270. Peningkatan ini menunjukkan perkembangan perekonomian Kota Solok telah bergerak positif sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Kemiskinan, dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik diharapkan angka kemiskinan akan dapat ditekan/dikurangi, pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin diperkirakan akan dapat ditekan sehingga lebih kecil dari jumlah pada tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah Rumah tangga miskin sebanyak 1.739 RTM sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan akan menjadi 1.626 RTM. Untuk mencapai/merealisasikan pengurangan tingkat/angka kemiskinan diperlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif dan berdaya guna sehingga masa mendatang angka kemiskinan akan dapat berkurang.

Pengangguran, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik diharapkan akan menciptakan lapangan kerja yang memungkinkan semakin besarnya penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012 angka pengangguran sebesar 6,80% sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 6,64%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Tantangan secara umum yang menjadi permasalahan hampir semua perkotaan di Indonesia pada dimensi ekonomi dapat dilihat dari marginalisasi sektor-sektor ekonomi informal. Sementara, diketahui bahwa sektor informal ini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi riil antara 20-70% (Sethurahman, 1981). Marginalisasi sektor informal memicu permasalahan kemiskinan perkotaan, kesenjangan, hingga krisis global.

Visi, Tantangan dan prospek perekonomian Kota Solok tahun 2014 dan 2015 dalam tahapan Menuju Solok Kota Perdagangan, Jasa Yang Maju dan Modern tidak terlepas dari perkembangan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka (perdagangan bebas) sekarang ini, kinerja makro ekonomi daerah cukup rentan terhadap gejolak eksternal, baik itu yang memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi maupun sebaliknya, ditambah

lagi letak Kota Solok yang strategis dijalur perlintasandan secara teori ekonomi di perkotaan lebih terbuka dibanding daerah yang bukan perkotaan, namun pengaruh dari gejolak eksternal tersebut tergantung pada karakteristik ekonomi daerah dan kekuatan faktor internal untuk mengimbangnya.

Tantangan utama perekonomian kota solok pada tahun 2014 dan 2015 mendatang masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu peningkatan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh disertai dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai keterbatasan dari sumber daya yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan fungsi kota sebagai motor dan pusat pertumbuhan "*Engine and Center of Growth*", dari daerah sekitar sehingga memberikan eksternalitas positif dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Pencapaian efisiensi dan produktifitas ekonomi sektoral.
3. Meningkatkan akses pelaku usaha mikro terhadap sumber daya ekonomi produktif.
4. Pertambahan jumlah penduduk dan menurunnya daya dukung lahan.
5. Optimalisasi pemanfaatan sarana, prasarana dan pasar.

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 dan tantangan perekonomian di atas, maka prospek perekonomian tahun 2014 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi.** Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok tahun 2014-2015 diperkirakan akan mengalami peningkatan atau setidaknya tetap bertahan di kisaran angka 6,8 s/d 7%, hal ini seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian regional dan nasional. Selain dengan makin baiknya kinerja ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2014juga akan dipicu dengan adanya kegiatan berskala Nasional berupa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Kepala Daerah Kota Solok Tahun 2015, yang secara bertahap telah mulai menggerakkan ekonomi daerah pada tahun 2013. Tingkat pergerakan pertumbuhan ekonomi yang dipicu dari kegiatan Pemilu tersebut tentunya dengan asumsi tingkat keamanan yang kondusif.
- 2. Pendapatan Perkapita.** Pendapatan perkapita masyarakat Kota Solok tahun 2014 diperkirakan mencapai sebesar Rp.26,47 juta dan tahun 2015 mencapai sebesar Rp.28,85 juta. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat ini terjadi seiring meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah yang mengindikasikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat untuk mendapat penghasilan yang lebih baik.
- 3. Tingkat Inflasi.** Inflasi pada tahun 2014 diharapkan dapat ditekan dibawah angka 6,2% dan tahun 2015dapat dikendalikan agar berada di bawah titik 6%. Naik dan turunnya tingkat inflasi ini akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah pusat serta pengaruh global. Disamping

itu juga dituntut peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran dari pasokan kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat yang dapat mendorong terjadinya peningkatan inflasi. Selain itu faktor keamanan yang kondusif juga akan memberi pengaruh terhadap angka inflasi, hal ini dikarenakan pada tahun 2014 akan ada Agenda Nasional berupa Pemilihan Umum yang akan dilanjutkan dengan Pemilu Pada tahun 2015.

- 4. Investasi.** Investasi sangat diperlukan dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Investasi dapat berasal dari pemerintah maupun dari swasta/masyarakat. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas, pada tahun 2014 dibutuhkan investasi sebesar Rp.742,6 milyar dan tahun 2015 dibutuhkan sebesar Rp.825,4 milyar. Diharapkan komponen investasi ini lebih besar bersumber dari Investasi Swasta.
- 5. Kemiskinan.** Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan angka kemiskinan dapat berkurang. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin diharapkan sudah turun menjadi sebanyak 1.523 RTM atau berkurang sebesar 6,47% dibandingkan dengan tahun 2013, dan tahun 2015 turun lagi menjadi sebanyak 1.428 RTM atau berkurang sebesar 6,22%.
- 6. Pengangguran.** Angka pengangguran juga dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan perekonomian daerah. Dari prediksi angka pengangguran Tahun 2014 yang berkisar 6,67% untuk Tahun 2015 meningkat menjadi 6,72%, hal ini diantaranya disebabkan keterbatasan ketersediaan lapangan kerja yang lebih kecil dibanding dengan laju pertumbuhan angkatan kerja.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan Akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Solok diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Solok selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Solok.

Gambaran pengelolaan pendapatan daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berasal dari :

- (i) Pajak Daerah
- (ii) Retribusi Daerah
- (iii) Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, khususnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada Pasal 2 ayat(2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan Umum; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) pajak sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan; dan (xi) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan-undangan tersebut, termasuk juga di Kota Solok. Guna menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Solok telah

menerbitkan beberapa Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

- (i) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- (ii) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- (iii) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
- (iv) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- (v) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktifitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung belum optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak/retribusi cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, dan realisasi target pajak/retribusi yang belum optimal.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung potensi penerimaan dari setiap jenis pungutan

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pengawasan terhadap pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak/retribusi daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kota Solok, dengan Pemerintah Provinsi tentang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi serta dengan Pemerintah Pusat tentang Dana Perimbangan.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun kontribusi PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD Kota Solok secara keseluruhan.

b. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena Dana Perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dan DAU pengalokasiannya pada program dan kegiatan ditentukan oleh daerah sedangkan DAK dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Migas, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Alam Perikanan.

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kota Solok dalam pendanaan daerah masih sangat

tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2013) rata-rata berkisar 80 persen dari total pendapatan daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD di Kota Solok bersumber dari:

- (i) Pendapatan Hibah
- (ii) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (AP)
- (iii) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- (iv) Dana Penyesuaian
- (v) Penerimaan lain-lain yang sah

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Solok masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Solok. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan propinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bukan bagi hasil pajak yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah selama kurun waktu tahun 2008-2013 terus mengalami kenaikan.

Ditinjau dari komponen pendapatan daerah, trend kenaikan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2014 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari dana perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Solok selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Selama kurun waktu 2008-2013 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Solok adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.1 Struktur Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Solok selama Tahun 2008-2013**

NO	TAHUN	PAD Rp	%	DANA PERIMBANGAN Rp	%	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH Rp	%	APBD Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 + 5 + 7
1.	2008	16.965.041.152,00	6,05	259.221.551.342,38	92,45	4.214.569.333,00	1,50	280.401.161.827,38
2.	2009	20.018.754.271,72	6,47	265.957.472.180,25	85,90	1.002.700.324,00	0,32	309.605.884.061,87
3.	2010	19.804.194.249,91	6,98	243.281.102.420,23	85,79	4.940.089.739,00	1,74	283.562.213.567,98
4.	2011	23.526.087.274,00	6,67	271.474.252.432,00	77,00	44.353.490.252,00	12,58	352.583.758.198,00
5.	2012	20.672.039.214,00	5,33	321.683.298.373,00	82,97	27.874.286.000,00	7,19	387.727.116.265,45
6.	2013	30.188.760.987,19	7,44	335.886.010.373,00	82,81	39.545.366.795,00	9,75	405.620.138.155,19
Rata-rata		21.862.479.524,80	6,50	282.917.281.186,81	84,06	20.321.750.407,17	6,04	336.583.378.679,31

Dari berbagai pertimbangan di atas, proyeksi Pendapatan Daerah di Kota Solok Tahun 2013-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Solok Tahun 2013-2015

NO	U R A I A N	TARGET TAHUN 2013	PROYEKSI TARGET TAHUN 2014	PROYEKSI TARGET TAHUN 2015
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.188.760.987,19	27.337.537.757,00	28.326.318.817,00
1.1	Pajak Daerah	3.481.123.800,00	4.550.746.276,00	4.732.776.127,00
1.2	Retribusi Daerah	8.574.482.272,00	8.574.482.272,00	8.917.461.563,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.720.015.125,64	6.720.015.126,00	6.988.815.731,00
1.4	Lain-lain PAD yang sah	11.413.139.789,55	7.492.294.083,00	7.687.265.396,00
2.	DANA PERIMBANGAN	359.187.011.749,00	328.354.885.130,00	328.354.885.130,00
2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	16.671.352.749,00	9.747.886.130,00	9.747.886.130,00
2.2	DAU	318.606.999.000,00	318.606.999.000,00	318.606.999.000,00
2.3	DAK	23.908.660.000,00	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	39.545.366.795,00	38.846.752.292	39.395.375.607
3.1	Hibah	-	-	-
3.2	Bagi Hasil Pajak Propinsi	11.671.080.795,00	10.972.466.292,00	11.521.089.607,00
3.3	Bantuan Keuangan dari Propinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.4	Dana Penyesuaian/Transfer	27.874.286.000,00	27.874.286.000,00	27.874.286.000,00
3.5	Penerimaan Lain-lain yg Sah	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN	428.921.139.531,19	394.539.175.179,00	396.076.579.554,00

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Solok selama kurun waktu tahun 2013-2015, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mendorong pencapaian target Pendapatan Daerah di Kota Solok berdasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Meningkatkan upaya-upaya kemandirian keuangan di Kota Solok antara lain dengan:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok dengan target kenaikan rata-rata 5 persen (atau lebih) setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah secara proporsional akan terus meningkat.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:
 - Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melaksanakan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Solok yaitu: Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - Mulai tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sudah merupakan salah satu sumber pajak daerah dalam PAD.
 - Mulai tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah dalam PAD, setelah secara bertahap mulai tahun 2012 dilakukan alih keterampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB sejak tahun 2012.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber atau potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan PAD dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Mengadakan pendataan terhadap berbagai objek dan jenis pendapatan yang baru, khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Menjalin dan membina hubungan baik dengan wajib pajak dan wajib retribusi.

- e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah
 - f. Mendukung implementasi teknologi secara terpadu atau terintegrasi guna mengintensifkan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi agar lebih optimal.
 - g. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang peningkatan pengelolaan pendapatan daerah baik kepada daerah kabupaten/kota lainnya, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi di Kota Solok.
 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan pendapatan daerah.
 6. Menegakkan hukum / *lawenforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
 7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 8. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji PNS) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Solok.
 9. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarannya karena bersifat given (pengeluaran/kegiatannya sudah ditentukan).
 10. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil dari propinsi yang diharapkan akan meningkat rata-rata 5 persen per tahun atau lebih.
 11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward dan punishment secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah.
 12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan Aset Daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
 13. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Solok melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terendah dilingkungan kelurahan dan kecamatan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda RPJMD tahun 2010-2015 di tahun keempat sebagaimana nanti akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2014.

Pengalokasian anggaran ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam dua puluh enam urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good local governance*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Inibertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjaminefektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur Belanja Daerah adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan dan digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersifat umum. Sebaliknya, Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2014 memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SILPA) cenderung tiap tahunnya menurun, maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2014 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2014 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2014 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kota Solok sesuai dengan RPJMD tahun 2010-2015.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2014 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan ditingkatkan pada akhirnya akan menjadi 10% dari total belanja.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah

dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

6. Keseimbangan Belanja dengan Pendapatan
Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dikenal anggaran belanja defisit dan surplus. Namun untuk tahun 2014 dilakukan kebijakan belanja berimbang dengan pendapatan, karena kalau terjadi defisit diperkirakan SILPA tahun anggaran 2013 yang tersedia tidak cukup untuk menutupi defisit belanja pada tahun anggaran 2014.
7. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan
Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Dana Hibah dan Dana Daruratharus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.
8. Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kota Solok maka pada tahun 2014 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi dibiayai dari APBD atau melakukan pembiayaan dengan pola cost sharing antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kota Solok. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2014.
9. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2014 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.
10. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Kota Solok.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisa realisasi belanja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja adalah sebesar 7,54% yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung adalah sebesar 14,81% dan rata-rata pertumbuhan belanja langsung adalah sebesar 1,99%.Selanjutnya dari analisa realisasi belanja tersebut diproyeksikan alokasi anggaran belanja daerah Kota Solok untuk tahun 2014dan 2015.

Dari tabel berikut ini dapat dilihat realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kota Solok untuk tahun 2010-2015:

**Tabel 3.3Realisasi Dan Proyeksi Belanja
Pemerintah Kota SolokselamaTahun 2010-2015**

NO	URAIAN	REALISASI BELANJA				PROYEKSI BELANJA	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
I	BELANJA	309.573.887.558	357.354.160.494	397.809.893.270	475.732.910.936	388.384.151.887	394.272.661.460
1	Belanja Tidak Langsung	168.020.037.947	189.151.204.536	200.564.919.527	251.027.935.120	253.191.876.583	259.080.386.156
	Belanja Pegawai	144.502.412.828	167.563.946.033	192.801.988.823	229.795.534	235.540.382.923	241.428.892.496
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	20.116.515.433	17.550.279.093	6.804.154.249	10.977.830.700	8.233.373.025	8.233.373.025
	Belanja Bantuan Sosial	3.303.859.685	3.645.566.409	950.506.654	3.345.953.000	2.509.464.750	2.509.464.750
	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov.	-	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Pemerintah	-	-	-	322.356.885	322.356.885	322.356.885
	Belanja Tidak Terduga	97.250.000	391.413.000	8.269.800	6.586.299.000	6.586.299.000	6.586.299.000
2	Belanja Langsung	141.553.849.611	168.202.955.959	197.244.973.743	224.704.975.816	135.192.275.303	135.192.275.303
	Belanja Pegawai	19.344.658.500	15.812.902.840	16.466.795.570	25.185.796.840	15.111.478.104	15.111.478.104
	Belanja Barang dan Jasa	72.221.285.674	90.444.243.141	76.384.051.153	116.757.188.876	64.216.453.881	64.216.453.881
	Belanja Modal	49.987.905.437	61.945.809.977	104.394.127.020	82.761.990.100	55.864.343.317	55.864.343.317

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Dari analisa realisasi pembiayaan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun berikutnya adalah

sebesar(15,47%). Hal ini menggambarkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setiap tahunnya cenderung menurun sehingga dalam penganggaran diupayakan agar dilakukan anggaran berimbang antara pendapatan dengan belanja sehingga SILPA yang tersedia hanya digunakan untuk menutup pengeluaran pembiayaan.

Melihat rata-rata pertumbuhan SILPA yang cenderung terus menurun, maka pemerintah daerah pada tahun 2014 akan melakukan kebijakan pengurutan prioritas program dan kegiatan pembangunan sehingga dalam pengalokasian anggaran dapat terpenuhi oleh sumber pendapatan daerah yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar SILPA yang tersedia dalam penerimaan pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk menutup pengeluaran pembiayaan. Disamping itu pemerintah daerah juga harus mempersiapkan pemupukan dana cadangan dalam rangka membiayai Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2015.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Solok untuk tahun 2010-2015:

**Tabel 3.4 Realisasi Dan Proyeksi Pembiayaan
Pemerintah Kota Solok selama Tahun 2010-2015**

NO	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN				PROYEKSI PEMBIAYAAN	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
I	PEMBIAYAAN						
1	Penerimaan Daerah	130.937.990.902	103.825.316.912	94.460.867.996	88.293.772.781	75.000.000	75.000.000
	SILPA Tahun Sebelumnya	130.937.990.901	103.700.316.912	94.385.867.995	88.218.772.780	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	125.000.000	75.000.000,00	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2	Pengeluaran Daerah	1.189.000.000	2.843.752.999	7.961.766.350	18.181.000.000	6.375.000.000	4.575.000.000
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.139.000.000	2.268.752.999	7.886.766.350	17.606.000.000	5.800.000.000	4.000.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	-	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000